

Instagram sebagai Ruang Politik Digital Mahasiswa: Analisis Filsafat Politik dan Relevansinya terhadap Pendidikan Islam

Ayu Gintari¹, Afifuddin Harisah², Andi Marjuni³

¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, e-mail: ayu.gintari@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, e-mail: afifuddin.harisah@uin-alauddin.ac.id

³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, e-mail: marjuni@uin-alauddin.ac.id

Histori Naskah

Diserahkan:
16-06-2026

Direvisi:
30-06-2026

Diterima:
08-07-2026

Keywords

ABSTRACT

The rapid growth of social media has transformed political communication among young people, making Instagram an important digital political space for accessing information, expressing opinions, and participating in democratic processes. This study aims to analyze the use of Instagram as a digital political space among students of the Faculty of Teacher Training and Education, Tanjungpura University, through the lens of political philosophy and to examine its relevance to Islamic Education. This study employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through semi-structured interviews and document analysis and analyzed using thematic analysis. The findings indicate that Instagram functions as a digital public sphere that facilitates political information, discussion, and participation. Students perceive freedom of expression as a right accompanied by responsibility, verify political information before sharing it, and recognize the influence of algorithms in shaping political perceptions. The findings are relevant to Islamic Education by reinforcing the values of tabayyun (verification), šidq (truthfulness), amānah (trustworthiness), shūrā (deliberation), and al-'adl (justice) as ethical principles for political communication in digital spaces. These findings contribute to strengthening political literacy, digital literacy, and ethical citizenship within the context of Islamic Education.

Instagram; digital political space; political philosophy; Islamic Education; political literacy

ABSTRAK

Perkembangan media sosial telah mengubah pola komunikasi politik generasi muda dan menjadikan Instagram sebagai ruang politik digital bagi mahasiswa dalam memperoleh informasi, menyampaikan pendapat, dan berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis penggunaan Instagram sebagai ruang politik digital di kalangan mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura melalui kajian filsafat politik serta mengkaji relevansinya terhadap Pendidikan Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Instagram berfungsi sebagai ruang publik digital yang memfasilitasi akses informasi politik, diskusi, dan partisipasi politik mahasiswa. Mahasiswa memaknai kebebasan berpendapat sebagai hak yang harus disertai tanggung jawab, melakukan verifikasi terhadap informasi sebelum membagikannya, serta menyadari pengaruh algoritma dalam membentuk persepsi politik. Temuan penelitian menunjukkan relevansi terhadap Pendidikan Islam melalui penguatan nilai tabayyun, šidq, amanah, syūrā, dan al-'adl sebagai landasan etika komunikasi politik di ruang digital. Penelitian ini berkontribusi pada penguatan literasi politik, literasi digital, dan pembentukan karakter kewargaan yang beretika dalam konteks Pendidikan Islam.

Kata Kunci : Instagram; ruang politik digital; filsafat politik; Pendidikan Islam; literasi politik

Corresponding Author : Ayu Gintari, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Jl Sultan Alauddin No. 63, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, e-mail: ayu.gintari@gmail.com

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi, berkomunikasi, dan berpartisipasi dalam kehidupan publik. Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat penggunaan media sosial yang sangat tinggi, terutama pada kelompok usia muda yang didominasi oleh pelajar dan mahasiswa. Perkembangan tersebut mendorong perubahan pola interaksi masyarakat dari ruang fisik menuju ruang digital sehingga media sosial tidak lagi diposisikan semata sebagai sarana komunikasi interpersonal, tetapi telah berkembang menjadi ruang publik digital yang memungkinkan setiap individu memperoleh informasi, membangun opini, mendiskusikan persoalan sosial, hingga terlibat dalam aktivitas politik. Di antara berbagai platform yang berkembang, Instagram menjadi salah satu media sosial yang paling banyak digunakan oleh generasi muda karena menawarkan kombinasi antara konten visual, interaktivitas, algoritma personalisasi, serta kemudahan penyebaran informasi secara cepat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Instagram tidak lagi hanya berfungsi sebagai media hiburan, tetapi telah menjadi ruang politik digital, yaitu ruang virtual tempat berlangsungnya pertukaran gagasan, pembentukan opini publik, partisipasi warga negara, serta kontestasi berbagai kepentingan politik (Gupta & Bhardwaj, 2024; Oden-Porter, 2023). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa praktik politik mengalami perubahan yang cukup mendasar. Jika sebelumnya aktivitas politik lebih banyak berlangsung melalui organisasi kemahasiswaan, forum akademik, media massa, maupun ruang-ruang diskusi tatap muka, kini proses pembentukan opini, penyebaran informasi, mobilisasi dukungan, hingga penyampaian kritik terhadap kebijakan publik semakin banyak berlangsung melalui media sosial. Mahasiswa sebagai kelompok intelektual berada pada posisi strategis dalam perubahan tersebut karena tidak hanya berperan sebagai konsumen informasi politik, tetapi juga sebagai produsen wacana, pembentuk opini publik, sekaligus agen perubahan sosial. Berbagai fitur Instagram seperti Feed, Story, Reels, Live, dan kolom komentar memungkinkan mahasiswa menyampaikan pandangan politik, mengikuti perkembangan isu-isu kebangsaan, memberikan tanggapan terhadap kebijakan pemerintah, hingga membangun jejaring diskusi secara terbuka tanpa dibatasi ruang dan waktu. Dengan demikian, Instagram telah menghadirkan bentuk baru ruang politik yang bersifat digital, partisipatif, interaktif, dan berlangsung secara terus-menerus.

Perubahan tersebut tidak hanya menggeser media komunikasi politik, tetapi juga menghadirkan persoalan filosofis mengenai hakikat ruang politik itu sendiri. Ruang politik digital tidak lagi sekadar menjadi tempat bertukar informasi, melainkan arena tempat kebebasan berekspresi, pembentukan legitimasi, pertarungan gagasan, produksi pengetahuan, serta relasi kekuasaan berlangsung melalui mekanisme algoritma media sosial. Pada saat yang sama, fenomena penyebaran disinformasi, polarisasi politik, *echo chamber*, ujaran kebencian, hingga aktivisme digital yang bersifat simbolik (*slacktivism*) menunjukkan bahwa ruang politik digital menghadirkan tantangan baru terhadap kualitas demokrasi. Persoalan tersebut menjadikan media sosial bukan hanya menarik dikaji dari perspektif komunikasi atau teknologi informasi, tetapi juga sebagai persoalan filsafat politik yang berkaitan dengan kebebasan, keadilan, legitimasi, tanggung jawab, dan etika kehidupan bersama.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa Instagram memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan kesadaran politik generasi muda. Gupta dan Bhardwaj (2024) menemukan bahwa mahasiswa di berbagai perguruan tinggi di Delhi menjadikan Instagram sebagai salah satu sumber utama informasi politik yang memengaruhi tingkat kesadaran politik mereka. Penelitian Oden-Porter (2023) juga menunjukkan bahwa media sosial meningkatkan *civic engagement* remaja melalui kemudahan memperoleh informasi, mengikuti perkembangan isu publik, dan berpartisipasi dalam diskusi politik. Namun demikian, algoritma media sosial juga berpotensi membentuk *echo chamber* yang memperkuat polarisasi afektif serta bias informasi apabila tidak diimbangi dengan kemampuan literasi digital yang memadai. Dalam konteks Indonesia, kajian mengenai media sosial dan politik berkembang cukup pesat, tetapi sebagian besar masih berorientasi pada pengaruh media

sosial terhadap pendidikan politik, perilaku memilih, maupun partisipasi politik mahasiswa. Penelitian mengenai akun Instagram @PinterPolitik menunjukkan bahwa media tersebut berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi politik mahasiswa meskipun bukan menjadi faktor utama yang menentukan perilaku politik mereka. Penelitian lain menunjukkan bahwa media sosial mampu meningkatkan kesadaran politik, memperluas ruang diskusi publik, dan mendorong partisipasi politik digital mahasiswa. Akan tetapi, penelitian tersebut juga menemukan berbagai persoalan berupa penyebaran disinformasi, rendahnya literasi digital, serta munculnya fenomena *slacktivism*, yaitu partisipasi politik yang berhenti pada aktivitas simbolik di media sosial tanpa diwujudkan dalam tindakan nyata.

Fenomena serupa juga ditemukan pada mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura. Penelitian Ilhami dkk. (2025) menunjukkan bahwa Instagram telah dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan politik nonformal yang memperluas akses mahasiswa terhadap informasi politik, meningkatkan kesadaran mengenai hak dan kewajiban warga negara, serta mendorong berkembangnya budaya diskusi publik. Akan tetapi, penelitian tersebut masih berfokus pada fungsi edukatif media sosial dan belum menjelaskan bagaimana mahasiswa memaknai Instagram sebagai ruang politik digital yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi, relasi kekuasaan, pembentukan opini publik, legitimasi informasi, serta tanggung jawab moral dalam kehidupan demokrasi.

Perspektif filsafat politik menawarkan kerangka analisis yang lebih mendasar untuk memahami fenomena tersebut. Filsafat politik tidak hanya membahas praktik politik dalam pengertian empiris, tetapi merefleksikan hakikat kekuasaan, kebebasan, keadilan, legitimasi, partisipasi warga negara, dan hubungan antara individu dengan negara. Dengan demikian, ruang politik digital dipahami sebagai arena pembentukan kehendak bersama (*public will*), ruang deliberasi demokratis, sekaligus ruang tempat nilai, kepentingan, dan kekuasaan diproduksi, diperdebatkan, serta dinegosiasikan. Aktivitas mahasiswa di Instagram tidak hanya mencerminkan perilaku komunikasi digital, tetapi juga merupakan praktik politik yang memiliki dimensi normatif sehingga memerlukan refleksi filosofis untuk memahami makna, tujuan, dan implikasinya terhadap kehidupan demokrasi (Madung, 2013).

Dalam perspektif Pendidikan Islam, aktivitas politik digital tidak cukup diukur dari tingginya intensitas partisipasi, tetapi juga dari kualitas moral yang melandasinya. Nilai-nilai *sidq* (kejujuran), *amanah*, *al-'adl* (keadilan), *mas'uliyah* (tanggung jawab), *syūrā* (musyawarah), dan *tabayyun* menjadi prinsip etis dalam membangun komunikasi politik yang beradab. Oleh karena itu, media sosial dapat menjadi instrumen pendidikan politik Islam apabila dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi yang benar, memperkuat literasi politik, mengembangkan sikap kritis, serta membangun dialog yang menghormati perbedaan pendapat. Sebaliknya, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, fitnah, maupun polarisasi politik melalui media sosial bertentangan dengan tujuan Pendidikan Islam yang menempatkan pembentukan akhlak sebagai orientasi utama. Penelitian Zainuddin (2024) menegaskan bahwa media sosial merupakan saluran yang efektif dalam pendidikan politik Islam sepanjang pemanfaatannya diarahkan pada pembentukan kesadaran politik yang berlandaskan nilai-nilai moral dan kemaslahatan masyarakat.

Berdasarkan telaah terhadap berbagai penelitian tersebut, dapat diidentifikasi adanya kesenjangan penelitian. Sebagian besar penelitian terdahulu mengkaji Instagram dari perspektif komunikasi politik, pendidikan politik, perilaku politik, atau literasi digital, sedangkan kajian yang menempatkan Instagram sebagai ruang politik digital melalui perspektif filsafat politik dalam kerangka Pendidikan Islam masih sangat terbatas, khususnya pada konteks mahasiswa FKIP Universitas Tanjungpura. Padahal, pendekatan filsafat politik memungkinkan peneliti menjelaskan bagaimana mahasiswa memaknai kebebasan berekspresi, partisipasi politik digital, legitimasi informasi, relasi kekuasaan, dan tanggung jawab moral sebagai bagian dari pembentukan warga negara yang demokratis sekaligus berkarakter Islami.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis penggunaan Instagram sebagai ruang politik digital di kalangan mahasiswa FKIP Universitas Tanjungpura melalui kajian filsafat politik serta mengkaji relevansi temuan tersebut terhadap Pendidikan Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian mengenai ruang politik digital sekaligus memberikan kontribusi konseptual bagi penguatan literasi politik, literasi digital, dan etika komunikasi dalam Pendidikan Islam di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam bagaimana mahasiswa memaknai penggunaan Instagram sebagai ruang politik digital dalam kehidupan akademik dan sosialnya. Penelitian kualitatif menekankan upaya memahami fenomena berdasarkan perspektif partisipan, sehingga mampu mengungkap makna, pengalaman, serta proses sosial yang tidak dapat dijelaskan melalui pengukuran statistik (Creswell, 2003; Moleong, 2013). Pendekatan ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, pengalaman, dan pandangan informan yang diperoleh dalam konteks alamiah sehingga memungkinkan peneliti memahami fenomena secara utuh.

Penelitian dilaksanakan pada mahasiswa aktif Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Tanjungpura. Informan penelitian berjumlah 14 mahasiswa yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria tersebut meliputi: (1) mahasiswa aktif FKIP Universitas Tanjungpura; (2) memiliki akun Instagram dan aktif menggunakannya sekurang-kurangnya selama satu tahun terakhir; (3) pernah mengakses, mengikuti, atau berinteraksi dengan konten yang berkaitan dengan isu politik, demokrasi, kebijakan publik, maupun kehidupan berbangsa melalui Instagram; dan (4) bersedia menjadi informan penelitian. Teknik purposive dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh informan yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang relevan terhadap fenomena yang dikaji sehingga data yang diperoleh lebih mendalam dan sesuai dengan fokus penelitian.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur yang dilakukan secara mendalam kepada seluruh informan. Bentuk wawancara ini dipilih karena memberikan keleluasaan kepada peneliti untuk mengeksplorasi jawaban informan tanpa keluar dari fokus penelitian. Wawancara diarahkan untuk menggali pengalaman mahasiswa dalam memanfaatkan Instagram sebagai sumber informasi politik, bentuk partisipasi politik digital yang dilakukan, pandangan mengenai kebebasan berekspresi, etika komunikasi politik di media sosial, proses pembentukan opini, serta relevansi nilai-nilai Pendidikan Islam dalam aktivitas politik digital. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap artikel ilmiah, buku filsafat politik, dan berbagai literatur yang berkaitan dengan media sosial, politik digital, filsafat politik, dan Pendidikan Islam sebagai landasan konseptual penelitian.

Analisis data dilakukan secara tematik dengan mengacu pada tahapan analisis data kualitatif yang meliputi proses transkripsi hasil wawancara, pemberian kode (*coding*), pengelompokan kode ke dalam kategori, identifikasi tema-tema utama, dan penafsiran makna dari setiap tema yang ditemukan. Analisis dilakukan secara berulang agar hubungan antartema dapat dipahami secara komprehensif. Tema-tema yang muncul kemudian diinterpretasikan menggunakan perspektif filsafat politik, khususnya mengenai kebebasan, partisipasi politik, legitimasi, kekuasaan, ruang publik digital, dan tanggung jawab warga negara, serta dianalisis dalam kerangka nilai-nilai Pendidikan Islam seperti *ṣidq*, *amanah*, *al-'adl*, *syūrā*, dan *tabayyun*. Untuk menjamin kredibilitas hasil penelitian, dilakukan uji keabsahan data melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, member checking dengan meminta beberapa informan mengonfirmasi kembali hasil interpretasi peneliti,

serta peer debriefing melalui diskusi dengan sejawat guna meminimalkan subjektivitas penafsiran. Penerapan teknik tersebut diharapkan dapat meningkatkan tingkat kredibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas hasil penelitian sehingga temuan yang diperoleh memiliki dasar akademik yang dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL PENELITIAN

A. Instagram sebagai Ruang Politik Digital Mahasiswa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Instagram telah mengalami transformasi fungsi di kalangan mahasiswa FKIP Universitas Tanjungpura. Platform yang pada awalnya digunakan sebagai media hiburan kini berkembang menjadi ruang publik digital yang menyediakan akses terhadap informasi politik, kebijakan pemerintah, isu demokrasi, hingga berbagai persoalan sosial yang berkembang di masyarakat. Hampir seluruh informan menyatakan bahwa mereka memperoleh informasi politik melalui konten yang muncul pada beranda, reels, story, maupun akun media massa dan lembaga pemerintah yang mereka ikuti.

Sebagian besar informan juga menilai bahwa Instagram memungkinkan terbentuknya ruang diskusi politik yang lebih terbuka dibandingkan media konvensional. Fitur komentar, story, reels, dan live dipandang memberikan kesempatan kepada pengguna untuk menyampaikan pendapat, bertukar informasi, serta mengikuti dinamika politik secara lebih cepat. Walaupun demikian, beberapa informan mengakui bahwa diskusi di Instagram cenderung berlangsung singkat dan belum mampu menggantikan kualitas dialog tatap muka yang lebih mendalam.

Temuan ini memperlihatkan bahwa Instagram telah menjalankan fungsi sebagai ruang publik digital (*digital public sphere*), yaitu arena tempat berlangsungnya pertukaran informasi, pembentukan opini publik, serta komunikasi politik antarpengguna.

Tabel 1. Temuan Penggunaan Instagram sebagai Ruang Politik Digital

No	Indikator	Temuan Hasil Wawancara
1	Intensitas penggunaan	Seluruh informan menggunakan Instagram setiap hari dengan durasi antara 2-5 jam.
2	Fungsi utama	Instagram dimanfaatkan untuk memperoleh berita, mengikuti isu sosial-politik, hiburan, aktivitas kampus, dan edukasi.
3	Ruang politik digital	Mayoritas informan memandang Instagram telah berkembang menjadi ruang diskusi politik yang memungkinkan pertukaran gagasan mengenai kebijakan publik, pemilu, demokrasi, dan berbagai isu sosial.
4	Interaksi politik	Bentuk interaksi meliputi membaca berita, memberikan like, komentar, repost, dan mengikuti akun politik maupun media massa.

B. Kebebasan Berpendapat dalam Ruang Politik Digital

Hasil wawancara menunjukkan bahwa seluruh informan mengakui kebebasan berpendapat sebagai hak setiap warga negara, termasuk dalam menyampaikan pandangan politik melalui Instagram. Bagi para informan, media sosial memberikan ruang yang lebih terbuka untuk menyampaikan aspirasi, memberikan kritik terhadap kebijakan publik, maupun mengikuti diskusi mengenai isu-isu politik yang sedang berkembang. Namun demikian, kebebasan tersebut dipahami bukan sebagai hak yang bersifat mutlak, melainkan harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan norma hukum, etika komunikasi, serta penghormatan terhadap hak pengguna lain.

Meskipun demikian, sebagian besar informan mengaku masih berhati-hati ketika menyampaikan pendapat politik di Instagram. Keraguan tersebut dipengaruhi oleh kekhawatiran akan munculnya kesalahpahaman, komentar negatif, maupun anggapan bahwa mereka berpihak pada kelompok politik tertentu. Kondisi ini menyebabkan sebagian informan lebih memilih mengikuti diskusi, memberikan tanda suka (*like*), atau membagikan informasi yang dianggap kredibel dibandingkan terlibat dalam perdebatan melalui kolom komentar.

Selain itu, seluruh informan menekankan bahwa kebebasan berpendapat harus disertai tanggung jawab moral. Informasi politik yang disampaikan perlu didasarkan pada fakta, diverifikasi terlebih dahulu, serta disampaikan dengan bahasa yang santun agar tidak memicu konflik maupun penyebaran disinformasi. Temuan ini menunjukkan bahwa mahasiswa memandang kebebasan berpendapat di ruang politik digital sebagai hak demokratis yang harus dijalankan secara bertanggung jawab.

Tabel 2. Temuan Kebebasan Berpendapat dalam Ruang Politik Digital

No	Indikator	Temuan Hasil Wawancara
1	Hak berpendapat	Seluruh informan mengakui kebebasan berpendapat sebagai hak setiap warga negara.
2	Batas kebebasan	Kebebasan harus dibatasi oleh etika, hukum, dan penghormatan terhadap hak orang lain.
3	Hambatan	Sebagian informan masih merasa khawatir disalahpahami atau memperoleh respons negatif ketika menyampaikan pendapat politik.
4	Tanggung jawab	Kebebasan harus diiringi tanggung jawab moral dalam menyampaikan informasi politik.

C. Partisipasi Politik Digital Mahasiswa

Hasil wawancara menunjukkan bahwa seluruh informan memandang aktivitas di Instagram sebagai salah satu bentuk partisipasi politik digital. Bentuk partisipasi yang dilakukan cukup beragam, mulai dari memberikan *like*, membagikan informasi politik, mengikuti akun media massa, lembaga pemerintah, dan akun edukasi politik, hingga mengikuti diskusi mengenai isu-isu kebangsaan. Aktivitas tersebut menunjukkan bahwa Instagram tidak hanya digunakan untuk mengakses informasi, tetapi juga menjadi media bagi mahasiswa untuk terlibat dalam proses komunikasi politik di ruang digital.

Mayoritas informan juga menyatakan bahwa penggunaan Instagram meningkatkan kepedulian mereka terhadap berbagai persoalan publik, seperti kebijakan pemerintah, pelaksanaan pemilu, hak konstitusional warga negara, dan isu sosial yang sedang berkembang. Kemudahan memperoleh informasi melalui media sosial membuat mahasiswa lebih cepat mengikuti dinamika politik dibandingkan melalui media konvensional. Namun demikian, hampir seluruh informan berpendapat bahwa partisipasi politik digital tidak dapat menggantikan keterlibatan langsung dalam kehidupan demokrasi. Aktivitas di media sosial dinilai baru memberikan kontribusi yang bermakna apabila diikuti dengan tindakan nyata, seperti menggunakan hak pilih, mengikuti forum diskusi, seminar, maupun kegiatan sosial kemasyarakatan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa memaknai partisipasi politik digital sebagai bentuk keterlibatan awal dalam kehidupan demokrasi. Meskipun media sosial memberikan ruang yang luas untuk berinteraksi dan menyampaikan aspirasi, informan menyadari bahwa kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh aktivitas di ruang digital, tetapi juga oleh partisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan politik di dunia nyata.

Tabel 3. Temuan Partisipasi Politik Digital Mahasiswa

No	Indikator	Temuan Hasil Wawancara
1	Bentuk partisipasi digital	Informan melakukan berbagai bentuk partisipasi politik digital seperti memberikan <i>like</i> , komentar, membagikan (<i>repost</i>) informasi politik, mengikuti akun media, lembaga pemerintah, maupun akun edukasi politik.
2	Kesadaran politik	Instagram meningkatkan akses mahasiswa terhadap informasi politik sehingga mendorong kepedulian terhadap isu-isu publik dan kebijakan pemerintah.
3	Partisipasi nyata	Mayoritas informan menilai bahwa aktivitas politik di media sosial belum cukup apabila tidak diikuti dengan keterlibatan langsung dalam kehidupan demokrasi,

4	Makna partisipasi	seperti menggunakan hak pilih, mengikuti seminar, atau kegiatan sosial.
		Partisipasi politik digital dipandang sebagai langkah awal dalam membangun keterlibatan warga negara, tetapi bukan satu-satunya bentuk partisipasi politik.

D. Opini Publik, Legitimasi Informasi, dan Kekuasaan Algoritma

Hasil wawancara menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa memiliki kesadaran yang cukup baik dalam menyikapi informasi politik yang beredar melalui Instagram. Informan menyatakan bahwa mereka tidak langsung menerima ataupun mempercayai informasi yang ditemukan di media sosial, tetapi terlebih dahulu melakukan verifikasi dengan membandingkannya dengan media massa, akun resmi pemerintah, maupun sumber informasi lain yang dianggap memiliki kredibilitas. Bagi para informan, proses verifikasi menjadi langkah penting untuk menghindari penyebaran informasi yang tidak benar sekaligus memastikan bahwa informasi yang diterima memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa legitimasi suatu informasi tidak ditentukan oleh tingkat popularitas sebuah unggahan. Sebagian besar informan menilai bahwa jumlah *likes*, komentar, maupun *followers* bukan merupakan indikator utama dalam menentukan kebenaran suatu informasi politik. Sebaliknya, kredibilitas sumber, kesesuaian fakta, serta adanya konfirmasi dari media atau institusi resmi menjadi pertimbangan utama sebelum mereka menerima ataupun membagikan informasi tersebut kepada orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa cenderung menggunakan pertimbangan rasional dalam mengevaluasi informasi politik yang diperoleh melalui media sosial.

Di sisi lain, hampir seluruh informan mengakui bahwa algoritma Instagram memiliki pengaruh yang besar terhadap informasi yang mereka konsumsi setiap hari. Konten yang muncul pada halaman beranda umumnya disesuaikan dengan aktivitas pengguna sehingga isu-isu tertentu lebih sering muncul dibandingkan isu lainnya. Selain algoritma, media massa, influencer, akademisi, serta akun pemerintah juga dipandang memiliki peran dalam membentuk persepsi politik mahasiswa. Dengan demikian, opini publik di ruang digital tidak hanya dibentuk oleh interaksi antarpengguna, tetapi juga dipengaruhi oleh mekanisme algoritmik yang menentukan distribusi informasi di media sosial.

Tabel 4. Temuan Opini Publik, Legitimasi Informasi, dan Kekuasaan Algoritma

No	Indikator	Temuan Hasil Wawancara
1	Verifikasi informasi	Mayoritas informan tidak langsung mempercayai informasi politik di Instagram, tetapi melakukan verifikasi melalui media resmi atau sumber lain yang kredibel.
2	Legitimasi informasi	Kredibilitas informasi lebih ditentukan oleh kejelasan sumber, isi informasi, dan proses verifikasi daripada jumlah likes, komentar, atau followers.
3	Pembentukan opini publik	Media massa, influencer, dan akun resmi pemerintah dipandang memiliki pengaruh dalam membentuk opini politik mahasiswa.
4	Kekuasaan algoritma	Algoritma Instagram dianggap menentukan jenis informasi yang muncul pada beranda pengguna sehingga memengaruhi persepsi terhadap isu politik.

E. Relevansi Ruang Politik Digital terhadap Pendidikan Islam

Hasil wawancara menunjukkan bahwa dimensi etika merupakan aspek yang paling dominan dalam penggunaan Instagram sebagai ruang politik digital. Hampir seluruh informan menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat harus diiringi dengan tanggung jawab

moral. Informasi politik yang diperoleh melalui Instagram tidak seharusnya langsung diterima atau disebarkan, tetapi perlu diverifikasi terlebih dahulu melalui sumber yang terpercaya. Selain itu, para informan juga menekankan pentingnya menjaga kejujuran dalam menyampaikan informasi, menghindari penyebaran hoaks, serta menggunakan bahasa yang santun ketika berdiskusi mengenai persoalan politik.

Mayoritas informan memandang bahwa media sosial seharusnya menjadi ruang yang mendorong dialog dan pertukaran gagasan secara sehat. Oleh karena itu, perbedaan pandangan politik dipandang sebagai sesuatu yang wajar selama disampaikan dengan menghormati hak orang lain dan tidak disertai ujaran kebencian maupun serangan yang bersifat personal. Informan juga mengakui bahwa setiap pengguna memiliki tanggung jawab untuk memastikan informasi yang dibagikan tidak menimbulkan kesalahpahaman ataupun konflik di tengah masyarakat. Dengan demikian, etika politik digital tidak hanya dipahami sebagai tata krama dalam berkomunikasi, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kualitas informasi dan kehidupan demokrasi di ruang digital.

Tabel 5. Temuan Relevansi Ruang Politik Digital terhadap Pendidikan Islam

No	Indikator	Temuan Hasil Wawancara
1	Tabayyun (verifikasi informasi)	Mayoritas informan selalu memeriksa kredibilitas sumber dan membandingkan informasi politik sebelum mempercayai atau membagikannya.
2	Şidq (kejujuran)	Informan menilai informasi politik harus disampaikan berdasarkan fakta serta menolak penyebaran hoaks, fitnah, dan disinformasi.
3	Amanah (tanggung jawab)	Mahasiswa menyadari bahwa setiap pengguna media sosial bertanggung jawab terhadap informasi yang disebarkan dan dampaknya bagi masyarakat.
4	Syūrā (musyawarah)	Instagram dipandang sebagai ruang diskusi yang memungkinkan pertukaran pendapat, namun harus dilakukan secara santun dan menghormati perbedaan pandangan.
5	Al-'Adl (keadilan)	Informan menghendaki komunikasi politik yang tidak diskriminatif, menghargai hak setiap orang untuk berpendapat, serta menghindari ujaran kebencian dan serangan pribadi.

PEMBAHASAN

A. Instagram sebagai Ruang Politik Digital Mahasiswa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Instagram telah mengalami transformasi fungsi di kalangan mahasiswa FKIP Universitas Tanjungpura. Platform yang semula lebih banyak dimanfaatkan sebagai media hiburan kini berkembang menjadi ruang politik digital yang digunakan untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan pemerintah, isu demokrasi, pemilu, hingga berbagai persoalan sosial yang berkembang di masyarakat. Melalui fitur *feed*, *story*, *reels*, dan kolom komentar, mahasiswa tidak hanya mengakses informasi, tetapi juga mengikuti diskusi serta mengamati beragam pandangan mengenai isu-isu publik. Temuan ini menunjukkan bahwa aktivitas politik mahasiswa semakin bergeser dari ruang konvensional menuju ruang digital yang lebih terbuka dan mudah diakses.

Perubahan tersebut dapat dipahami melalui konsep public sphere yang dikemukakan Habermas (1991). Dalam *The Structural Transformation of the Public Sphere*, Habermas menjelaskan bahwa ruang publik merupakan arena sosial yang memungkinkan warga negara bertemu sebagai individu yang setara untuk mendiskusikan persoalan bersama melalui argumentasi yang rasional, sehingga opini publik dapat terbentuk secara bebas dari dominasi negara maupun kepentingan ekonomi.

Dalam perkembangan masyarakat digital, konsep ruang publik mengalami perubahan yang cukup mendasar. Pembayun (2017) menjelaskan bahwa kehadiran internet telah merekonstruksi ruang publik Habermas menjadi ruang virtual yang mampu memperluas partisipasi masyarakat tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Internet memungkinkan masyarakat tidak lagi sekadar

menjadi penerima informasi, tetapi juga berperan sebagai produsen informasi dan aktor yang terlibat dalam diskusi mengenai berbagai persoalan publik. Namun, ruang publik digital juga menghadapi tantangan berupa penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, dominasi kelompok tertentu, serta rendahnya kualitas argumentasi yang berkembang di media digital.

Hasil penelitian ini menunjukkan kesesuaian dengan pandangan tersebut. Mahasiswa memanfaatkan Instagram untuk mengikuti akun media massa, lembaga pemerintah, organisasi kemahasiswaan, maupun tokoh publik sebagai sumber informasi politik. Selain memperoleh informasi, mereka juga memanfaatkan fitur komentar, *story*, dan *reels* untuk mengikuti dinamika diskusi yang berkembang. Kondisi ini memperlihatkan bahwa Instagram telah berfungsi sebagai ruang komunikasi yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi sekaligus pembentukan opini politik di kalangan mahasiswa.

Temuan penelitian ini juga menguatkan argumentasi Setiawan (2023) yang menyatakan bahwa media sosial memiliki potensi menjadi ruang publik politik karena karakteristiknya yang partisipatif, interaktif, dan memungkinkan setiap pengguna berperan sebagai produsen maupun konsumen informasi. Menurut Setiawan, media sosial dapat mendukung demokrasi apabila komunikasi dibangun melalui diskursus yang rasional, terbuka, dan berorientasi pada kepentingan publik, bukan sekadar memperkuat kepentingan kelompok tertentu. Oleh karena itu, kualitas ruang publik digital tidak hanya ditentukan oleh kemudahan mengakses informasi, tetapi juga oleh kualitas komunikasi yang berlangsung di dalamnya.

Pandangan tersebut sejalan dengan Tricana yang menegaskan bahwa media seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai saluran penyebaran informasi, tetapi juga menjadi forum yang mempertemukan berbagai gagasan dan memungkinkan masyarakat membangun opini publik secara demokratis. Ketika media mampu menghadirkan ruang dialog yang terbuka, masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik secara lebih aktif. Sebaliknya, apabila media lebih didominasi oleh kepentingan ekonomi maupun politik, maka fungsi ruang publik akan mengalami pergeseran sehingga komunikasi publik kehilangan sifat kritis dan deliberatifnya (Tricana, t.t.).

Berdasarkan temuan tersebut dapat dipahami bahwa Instagram telah memenuhi sebagian karakteristik ruang publik digital sebagaimana dijelaskan oleh Habermas. Platform ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh informasi, menyampaikan pendapat, serta mengikuti berbagai diskusi mengenai isu publik. Akan tetapi, ruang politik digital belum sepenuhnya mencerminkan ruang publik deliberatif karena interaksi yang terjadi masih dipengaruhi oleh algoritma platform, arus informasi yang sangat cepat, dan kecenderungan pengguna lebih banyak mengonsumsi konten daripada membangun dialog yang argumentatif. Oleh sebab itu, penguatan literasi politik dan literasi digital menjadi prasyarat penting agar Instagram tidak hanya menjadi ruang pertukaran informasi, tetapi juga menjadi ruang publik yang mampu memperkuat kualitas demokrasi di kalangan mahasiswa.

B. Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif Filsafat Politik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa memaknai kebebasan berpendapat sebagai hak yang melekat pada setiap warga negara, termasuk ketika menggunakan Instagram sebagai ruang politik digital. Namun, hak tersebut tidak dipahami sebagai kebebasan yang tanpa batas, melainkan harus dijalankan dengan memperhatikan etika, norma hukum, dan penghormatan terhadap hak pengguna lain. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya melihat kebebasan sebagai hak individual, tetapi juga sebagai tanggung jawab sosial dalam kehidupan demokrasi.

Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran John Stuart Mill (1859/2003) dalam *On Liberty* yang menegaskan bahwa kebebasan merupakan hak fundamental setiap individu, tetapi pelaksanaannya dibatasi oleh harm principle, yaitu kebebasan seseorang tidak boleh menimbulkan

kerugian bagi orang lain. Dalam konteks media sosial, prinsip ini menjadi relevan karena kebebasan menyampaikan pendapat harus disertai tanggung jawab untuk tidak menyebarkan informasi palsu, ujaran kebencian, maupun bentuk komunikasi yang dapat merugikan pihak lain. Dengan demikian, kebebasan berekspresi bukan hanya persoalan hak, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral dalam menjaga kualitas ruang publik digital.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa sebagian besar mahasiswa masih berhati-hati ketika menyampaikan pandangan politik di Instagram karena khawatir menimbulkan kesalahpahaman, memperoleh komentar negatif, atau dianggap berpihak kepada kelompok politik tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang digital menghadirkan peluang sekaligus risiko dalam praktik demokrasi. Lakapu, Stefanus, dan Udju (2024) menjelaskan bahwa kebebasan berpendapat di media sosial merupakan bentuk kemerdekaan warga negara dalam menyampaikan pikiran, gagasan, dan ekspresi melalui platform digital, tetapi pelaksanaannya tetap dibatasi oleh kewajiban menjaga etika, tidak merugikan orang lain, serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Mereka juga menegaskan bahwa rendahnya pemahaman mengenai batas kebebasan berpendapat menjadi salah satu penyebab munculnya penyebaran disinformasi dan pencemaran nama baik di ruang digital.

Dari perspektif filsafat politik, temuan tersebut juga dapat dijelaskan melalui pemikiran Hannah Arendt (1958) yang memandang ruang publik sebagai arena tempat warga negara menampilkan identitas politiknya melalui tindakan dan komunikasi. Kebebasan berpendapat tidak berhenti pada hak untuk berbicara, tetapi merupakan bentuk partisipasi aktif dalam kehidupan publik. Oleh karena itu, keberanian menyampaikan pendapat harus diiringi dengan kesiapan menerima keberagaman pandangan dan membangun dialog yang menghormati keberadaan orang lain. Sikap mahasiswa yang lebih memilih menyampaikan aspirasi melalui cara-cara yang santun menunjukkan adanya kesadaran bahwa ruang politik digital tidak hanya membutuhkan kebebasan, tetapi juga kedewasaan dalam berkomunikasi.

Temuan penelitian ini juga memperkuat hasil penelitian Pratama, Rahman, dan Bachmid (2022) yang menyatakan bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hak konstitusional yang tidak dapat dihilangkan dalam negara demokrasi. Meskipun demikian, pembatasan terhadap kebebasan tersebut tetap dimungkinkan sepanjang bertujuan melindungi hak asasi orang lain, menjaga ketertiban umum, dan menciptakan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, kritik terhadap pemerintah maupun penyampaian aspirasi melalui media sosial merupakan bagian dari demokrasi, selama dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak melanggar hak pihak lain.

Lebih jauh, kualitas kebebasan berpendapat tidak hanya ditentukan oleh terbukanya akses terhadap media sosial, tetapi juga oleh kualitas dialog yang berlangsung di dalamnya. Dalam perspektif Habermas (1996), demokrasi deliberatif mensyaratkan adanya komunikasi yang rasional, argumentatif, dan bebas dari dominasi sehingga keputusan publik lahir melalui pertukaran alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa cenderung melakukan verifikasi informasi sebelum menyampaikan pendapat serta menghindari perdebatan yang bersifat provokatif. Sikap tersebut menunjukkan adanya kecenderungan berkembangnya praktik komunikasi deliberatif, meskipun ruang digital masih menghadapi tantangan berupa polarisasi, algoritma media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat.

Dalam perspektif Pendidikan Islam, kebebasan berpendapat tidak hanya dipahami sebagai hak konstitusional, tetapi juga sebagai amanah moral. Pendapat yang disampaikan harus dilandasi oleh *sidq* (kejujuran), *tabayyun* (verifikasi informasi), *amanah* (tanggung jawab), serta *al-'adl* (keadilan) agar tidak menimbulkan fitnah maupun kerugian bagi orang lain. Dengan demikian, penggunaan Instagram sebagai ruang politik digital tidak cukup hanya menjamin kebebasan berekspresi, tetapi juga perlu membangun budaya komunikasi yang etis, kritis, dan bertanggung

jawab. Temuan ini menunjukkan bahwa pendidikan politik di perguruan tinggi perlu mengintegrasikan literasi digital dengan pembentukan karakter sehingga mahasiswa tidak hanya memiliki keberanian menyampaikan pendapat, tetapi juga kemampuan menggunakan kebebasan tersebut secara bijaksana dalam kehidupan demokrasi.

C. Partisipasi Politik Digital sebagai *Civic Engagement*

Temuan penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa tidak lagi memaknai partisipasi politik hanya melalui keterlibatan dalam aktivitas politik konvensional, tetapi juga melalui berbagai bentuk interaksi di media sosial. Aktivitas seperti memberikan *like*, membagikan informasi, mengikuti akun lembaga pemerintah, media massa, maupun akun edukasi politik dipandang sebagai bagian dari keterlibatan warga negara dalam ruang digital. Meskipun bentuk partisipasi tersebut relatif sederhana, mahasiswa memandangnya sebagai upaya untuk mengikuti perkembangan isu publik sekaligus menunjukkan kepedulian terhadap kehidupan demokrasi.

Fenomena tersebut sejalan dengan konsep *civic engagement* yang memandang partisipasi warga negara tidak terbatas pada keikutsertaan dalam pemilu atau organisasi politik, tetapi juga mencakup keterlibatan dalam berbagai aktivitas yang mendorong terbentuknya kepedulian terhadap persoalan publik. Menurut Ehrlich (2000), *civic engagement* merupakan proses ketika individu menggunakan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan motivasi untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui berbagai bentuk partisipasi sosial maupun politik. Dalam konteks masyarakat digital, keterlibatan tersebut mengalami transformasi karena media sosial memungkinkan warga negara berpartisipasi secara lebih cepat, terbuka, dan tanpa batasan ruang.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Instagram berfungsi sebagai pintu masuk bagi mahasiswa untuk memahami berbagai isu politik yang sedang berkembang. Informasi mengenai kebijakan pemerintah, pemilu, hak konstitusional warga negara, maupun isu sosial lebih mudah diakses melalui media sosial dibandingkan media konvensional. Kondisi ini menunjukkan bahwa media sosial telah memperluas kesempatan generasi muda untuk berpartisipasi dalam ruang publik digital. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Setiawan (2023) yang menyatakan bahwa media sosial telah berkembang menjadi ruang publik baru yang memungkinkan masyarakat tidak hanya mengonsumsi informasi, tetapi juga berpartisipasi dalam proses pembentukan opini publik melalui komunikasi yang bersifat partisipatif dan interaktif. Dengan demikian, media sosial telah memperluas dimensi partisipasi politik generasi muda di era digital.

Meskipun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa tidak menganggap aktivitas digital sebagai bentuk partisipasi politik yang sepenuhnya memadai. Mayoritas informan menegaskan bahwa memberikan *like*, *repost*, atau mengikuti diskusi politik di Instagram hanyalah tahap awal yang perlu diikuti oleh keterlibatan langsung dalam kehidupan demokrasi, seperti menggunakan hak pilih, mengikuti seminar kebangsaan, kegiatan organisasi, maupun aktivitas sosial di masyarakat. Pandangan tersebut menunjukkan adanya kesadaran bahwa demokrasi tidak hanya dibangun melalui interaksi virtual, tetapi juga melalui tindakan nyata yang memberikan kontribusi terhadap kepentingan publik.

Temuan tersebut dapat dijelaskan melalui konsep digital *citizenship* yang menekankan bahwa warga negara digital tidak hanya memiliki kemampuan memanfaatkan teknologi, tetapi juga memahami hak, kewajiban, etika, serta tanggung jawab dalam ruang digital. Ribble (2015) menjelaskan bahwa kewargaan digital tidak berhenti pada kemampuan menggunakan media digital, melainkan mencakup kemampuan berpikir kritis, bertanggung jawab, serta berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan masyarakat melalui teknologi. Berdasarkan hasil penelitian, mahasiswa telah menunjukkan karakteristik tersebut dengan memanfaatkan Instagram untuk memperoleh informasi politik, mengikuti perkembangan isu publik, dan memperluas wawasan politik sebelum mengambil sikap terhadap suatu persoalan.

Lebih jauh, hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa mahasiswa tetap menempatkan partisipasi langsung sebagai inti kehidupan demokrasi. Pandangan ini sejalan dengan teori demokrasi partisipatoris yang dikemukakan oleh Carole Pateman (1970). Pateman menegaskan bahwa kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh keterlibatan aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan, bukan sekadar menjadi pengamat terhadap kebijakan publik. Oleh karena itu, media sosial seharusnya dipahami sebagai sarana yang memperluas kesempatan berpartisipasi, bukan sebagai pengganti partisipasi politik di dunia nyata.

Temuan penelitian ini juga memperoleh dukungan dari penelitian Lakapu, Stefanus, dan Udju (2024) yang menjelaskan bahwa perkembangan media sosial telah memperluas ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi politik secara lebih mudah. Akan tetapi, mereka menegaskan bahwa kebebasan dan partisipasi di media sosial tetap memerlukan tanggung jawab agar tidak berubah menjadi penyebaran informasi yang menyesatkan ataupun komunikasi yang merusak kualitas demokrasi. Oleh sebab itu, peningkatan partisipasi politik digital harus diiringi dengan penguatan literasi digital dan kesadaran etis agar media sosial benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan warga negara.

Dalam perspektif filsafat politik, temuan ini menunjukkan bahwa Instagram telah memperluas bentuk partisipasi politik generasi muda tanpa menghilangkan makna partisipasi konvensional. Media sosial berfungsi sebagai ruang pembelajaran politik yang memperkuat kesadaran kewargaan (*civic awareness*), sedangkan tindakan nyata di ruang publik tetap menjadi ukuran utama keterlibatan warga negara dalam demokrasi. Dengan demikian, partisipasi politik digital dan partisipasi politik konvensional bukanlah dua bentuk yang saling menggantikan, tetapi saling melengkapi dalam membangun budaya demokrasi yang partisipatif, kritis, dan bertanggung jawab.

D. Opini Publik, Legitimasi Informasi, dan Kekuasaan Algoritma dalam Ruang Digital

Temuan penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa tidak menerima informasi politik di Instagram secara pasif. Sebelum mempercayai ataupun menyebarkan suatu informasi, mereka cenderung membandingkannya dengan pemberitaan media massa, akun resmi pemerintah, maupun sumber lain yang dianggap memiliki kredibilitas. Pola tersebut menunjukkan bahwa legitimasi informasi di kalangan mahasiswa lebih banyak dibangun melalui proses verifikasi daripada sekadar popularitas sebuah unggahan. Temuan ini memperlihatkan adanya perubahan perilaku pengguna media sosial, dari sekadar konsumen informasi menjadi individu yang berupaya mengevaluasi kualitas informasi sebelum membentuk opini politik.

Kecenderungan tersebut dapat dijelaskan melalui konsep ruang publik yang dikemukakan Jürgen Habermas (1991). Habermas menjelaskan bahwa opini publik yang berkualitas hanya dapat terbentuk apabila warga negara memiliki kesempatan mengakses informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta terlibat dalam komunikasi yang rasional. Dalam ruang publik yang ideal, legitimasi suatu informasi tidak ditentukan oleh besarnya dukungan sosial ataupun popularitasnya, tetapi oleh kekuatan argumen dan validitas bukti yang menyertainya. Oleh karena itu, kebiasaan mahasiswa melakukan verifikasi sebelum menerima informasi menunjukkan bahwa mereka berupaya membangun penilaian politik melalui pertimbangan rasional, bukan semata-mata mengikuti arus opini yang berkembang di media sosial.

Temuan penelitian ini juga memperlihatkan bahwa jumlah *likes*, komentar, maupun *followers* tidak dijadikan ukuran utama dalam menentukan kebenaran suatu informasi. Mahasiswa justru lebih menaruh perhatian pada identitas sumber, kesesuaian isi informasi dengan fakta, serta adanya konfirmasi dari lembaga resmi. Sikap tersebut menunjukkan berkembangnya kemampuan berpikir kritis dalam menyikapi arus informasi digital. Hal ini sejalan dengan temuan Kusumawati et al. (2025) yang menjelaskan bahwa literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga mencakup kemampuan mengevaluasi informasi secara kritis,

mengenali misinformasi, serta mengambil keputusan berdasarkan sumber yang kredibel. Mereka menegaskan bahwa kemampuan berpikir kritis menjadi bagian utama dari literasi digital karena membantu generasi muda membedakan fakta, opini, dan informasi yang bersifat manipulatif.

Lebih lanjut, kesadaran mahasiswa untuk memverifikasi informasi sebelum membagikannya menunjukkan bahwa proses pembentukan opini publik tidak lagi bergantung pada kecepatan memperoleh informasi, tetapi pada kemampuan mengevaluasi validitas informasi tersebut. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Tarumingkeng (2026) yang menegaskan bahwa tantangan utama masyarakat digital bukan lagi keterbatasan akses terhadap informasi, melainkan kemampuan menilai kualitas informasi di tengah banjir data, hoaks, bias kognitif, dan manipulasi digital. Menurut Tarumingkeng, individu pada era digital dituntut untuk memeriksa sumber, menimbang bukti, memahami konteks, serta bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil di ruang digital.

Di sisi lain, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa mahasiswa menyadari kuatnya pengaruh algoritma Instagram terhadap informasi yang mereka terima. Konten yang muncul pada halaman beranda dinilai lebih banyak ditentukan oleh pola interaksi pengguna dibandingkan kebutuhan informasi yang berimbang. Kesadaran tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa memahami informasi yang mereka konsumsi tidak sepenuhnya bersifat netral, melainkan dipengaruhi oleh mekanisme teknologi yang mengatur distribusi konten.

Fenomena tersebut dapat dianalisis melalui perspektif Michel Foucault (1980) mengenai relasi pengetahuan dan kekuasaan (*power/knowledge*). Foucault menjelaskan bahwa kekuasaan tidak selalu bekerja melalui paksaan, tetapi juga melalui mekanisme yang mengatur produksi, distribusi, dan legitimasi pengetahuan. Dalam konteks media sosial, algoritma dapat dipahami sebagai bentuk kekuasaan baru yang menentukan informasi mana yang lebih sering muncul, informasi mana yang disembunyikan, bahkan isu apa yang memperoleh perhatian publik. Dengan demikian, algoritma tidak sekadar bekerja sebagai sistem teknis, tetapi turut memengaruhi pembentukan persepsi politik masyarakat melalui pengaturan arus informasi.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Manuel Castells (2010) melalui konsep *Network Society*, yang menjelaskan bahwa kekuasaan dalam masyarakat digital semakin bergeser ke dalam jaringan komunikasi yang dikendalikan oleh arus informasi. Dalam masyarakat jaringan, siapa yang mengendalikan distribusi informasi akan memiliki pengaruh yang besar terhadap pembentukan opini publik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa menyadari peran media massa, influencer, akademisi, dan akun resmi pemerintah dalam membentuk persepsi politik mereka. Namun, mereka juga mengakui bahwa algoritma Instagram menentukan intensitas kemunculan konten sehingga isu tertentu lebih dominan dibandingkan isu lainnya. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pembentukan opini publik di media sosial merupakan hasil interaksi antara pilihan individu dan mekanisme algoritmik yang bekerja di balik platform digital.

Dengan demikian, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa opini publik di ruang digital tidak lahir secara spontan, melainkan melalui proses yang melibatkan kemampuan berpikir kritis pengguna, kredibilitas sumber informasi, serta struktur algoritmik yang mengatur sirkulasi informasi. Oleh karena itu, penguatan literasi digital di perguruan tinggi tidak cukup diarahkan pada peningkatan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga perlu membangun kemampuan mahasiswa untuk memahami cara kerja algoritma, mengevaluasi legitimasi informasi, serta mempertahankan sikap kritis ketika berpartisipasi dalam ruang politik digital. Temuan ini sekaligus menegaskan bahwa kualitas demokrasi digital sangat bergantung pada kemampuan warga negara membedakan informasi yang sah dari informasi yang dimanipulasi, sehingga opini publik yang terbentuk benar-benar didasarkan pada pertimbangan rasional, bukan semata-mata pada popularitas atau intensitas kemunculan informasi.

E. Relevansi Ruang Politik Digital terhadap Pendidikan Islam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Instagram sebagai ruang politik digital tidak hanya dipahami mahasiswa sebagai sarana menyampaikan pendapat, tetapi juga sebagai ruang yang menuntut tanggung jawab moral. Kesadaran untuk memverifikasi informasi, menyampaikan pendapat secara jujur, menghargai perbedaan pandangan, serta menghindari penyebaran hoaks menunjukkan bahwa aktivitas politik digital tidak dapat dipisahkan dari dimensi etika. Temuan ini mengindikasikan bahwa mahasiswa memandang kualitas demokrasi digital tidak hanya ditentukan oleh kebebasan berekspresi, tetapi juga oleh integritas setiap pengguna dalam memanfaatkan media sosial.

Dalam perspektif Pendidikan Islam, temuan tersebut menunjukkan relevansi nilai tabayyun sebagai fondasi utama komunikasi politik digital. Konsep tabayyun yang bersumber dari QS. *Al-Hujurat* ayat 6 mengajarkan pentingnya memverifikasi informasi sebelum mempercayai maupun menyebarkannya agar tidak menimbulkan kesalahan yang merugikan pihak lain. Kebiasaan mahasiswa membandingkan informasi politik dengan media massa, akun resmi pemerintah, maupun sumber lain yang kredibel menunjukkan bahwa prinsip tabayyun telah menjadi bagian dari cara mereka membangun kepercayaan terhadap informasi politik. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nasoha et al. (2025) yang menjelaskan bahwa penerapan tabayyun di media sosial berperan penting dalam menjaga kebenaran informasi, mencegah penyebaran hoaks, serta menciptakan komunikasi digital yang lebih bertanggung jawab dan damai.

Selain tabayyun, hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa mahasiswa menempatkan *sidq* (kejujuran) sebagai prinsip utama dalam menyampaikan informasi politik. Informan menolak penyebaran berita yang belum jelas kebenarannya dan menilai bahwa informasi politik harus disampaikan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Sikap tersebut menunjukkan bahwa kejujuran tidak hanya dipahami sebagai nilai moral individual, tetapi juga sebagai prasyarat terbentuknya ruang publik yang sehat. Dalam etika komunikasi Islam, *sidq* merupakan prinsip dasar yang mengarahkan setiap individu untuk menjadikan kebenaran sebagai orientasi utama dalam komunikasi sehingga informasi yang disampaikan tidak menyesatkan masyarakat.

Nilai berikutnya yang tampak kuat dalam temuan penelitian adalah amanah. Mahasiswa menyadari bahwa setiap unggahan, komentar, maupun informasi yang dibagikan melalui Instagram memiliki konsekuensi sosial sehingga pengguna media sosial bertanggung jawab terhadap dampak komunikasi yang mereka lakukan. Amanah dalam konteks politik digital tidak hanya berarti menyampaikan informasi secara benar, tetapi juga mempertimbangkan manfaat serta risiko yang mungkin ditimbulkan bagi kehidupan masyarakat. Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa kebebasan berekspresi dipahami sebagai amanah yang harus dijalankan secara bertanggung jawab, bukan sekadar hak yang dapat digunakan tanpa mempertimbangkan akibatnya.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa mahasiswa memandang Instagram sebagai ruang dialog yang memungkinkan pertukaran berbagai pandangan politik. Akan tetapi, diskusi tersebut harus berlangsung dengan menghormati perbedaan, menghindari penghinaan, dan memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk menyampaikan pendapatnya. Sikap tersebut mencerminkan nilai *syūrā*, yaitu musyawarah yang berlandaskan dialog, saling menghargai, dan pencarian kemaslahatan bersama. Dalam perspektif Pendidikan Islam, *syūrā* tidak hanya dipahami sebagai mekanisme pengambilan keputusan, tetapi juga sebagai proses pendidikan yang membentuk kemampuan mendengar, berdialog, dan menerima keberagaman pandangan. Oleh karena itu, media sosial dapat berfungsi sebagai ruang pembelajaran demokrasi apabila interaksi yang terjadi dibangun atas dasar penghormatan terhadap sesama pengguna.

Di samping itu, hasil penelitian memperlihatkan bahwa mahasiswa menghendaki komunikasi politik yang bebas dari diskriminasi, ujaran kebencian, maupun serangan terhadap identitas pribadi. Mereka menilai bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk

menyampaikan pandangan politik selama dilakukan secara santun dan bertanggung jawab. Sikap tersebut mencerminkan implementasi nilai al-'adl (keadilan), yaitu memperlakukan setiap individu secara setara tanpa dipengaruhi latar belakang politik, agama, ataupun kelompok sosial tertentu. Dalam konteks demokrasi digital, keadilan menjadi prasyarat penting agar media sosial tidak berubah menjadi ruang dominasi maupun polarisasi, tetapi tetap menjadi ruang publik yang menjamin kesetaraan hak seluruh warga negara.

Temuan penelitian ini sekaligus memperluas makna literasi digital. Literasi digital tidak cukup dimaknai sebagai kemampuan mengakses atau menggunakan teknologi, tetapi juga mencakup kemampuan moral dalam mengevaluasi informasi dan bertanggung jawab atas setiap aktivitas digital. Kusumawati et al. (2025) menjelaskan bahwa literasi digital harus diiringi kemampuan berpikir kritis agar pengguna mampu mengevaluasi informasi, mengenali misinformasi, dan mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Dalam perspektif Pendidikan Islam, kemampuan tersebut memperoleh landasan etis melalui integrasi nilai *tabayyun*, *ṣidq*, amanah, *syūrā*, dan al-'adl sehingga literasi digital tidak hanya menghasilkan pengguna media sosial yang cakap secara teknis, tetapi juga memiliki karakter moral dalam berkomunikasi.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa Pendidikan Islam memberikan kontribusi konseptual terhadap penguatan etika politik digital. Nilai-nilai Islam tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku individu, tetapi juga sebagai kerangka normatif dalam membangun ruang publik digital yang lebih jujur, adil, dialogis, dan bertanggung jawab. Integrasi nilai *tabayyun*, *ṣidq*, amanah, *syūrā*, dan al-'adl memperlihatkan bahwa pendidikan politik di perguruan tinggi tidak cukup berorientasi pada peningkatan literasi digital, melainkan juga perlu diarahkan pada pembentukan karakter warga negara digital yang berintegritas serta mampu menjaga kualitas demokrasi di era media sosial.

F. Implikasi Penggunaan Instagram terhadap Pendidikan Politik Mahasiswa

Rangkaian temuan penelitian memperlihatkan bahwa proses pembelajaran politik di kalangan mahasiswa sedang mengalami perubahan yang cukup mendasar. Perkembangan media digital tidak hanya memperluas akses terhadap informasi publik, tetapi juga mengubah cara generasi muda memahami isu kenegaraan, membangun sikap terhadap kebijakan, serta menentukan bentuk keterlibatan mereka dalam kehidupan demokrasi. Dengan demikian, proses pembentukan kesadaran politik tidak lagi berlangsung secara eksklusif melalui ruang akademik, melainkan juga berkembang melalui interaksi yang berlangsung setiap hari di lingkungan digital.

Dari sisi konseptual, penelitian ini memberikan sudut pandang baru terhadap kajian filsafat politik dengan menunjukkan bahwa pembentukan kesadaran kewargaan pada era digital dipengaruhi oleh keterkaitan antara kebebasan berekspresi, penilaian terhadap kredibilitas informasi, proses pembentukan opini, dan pertimbangan etis ketika berkomunikasi. Hubungan antaraspek tersebut memperlihatkan bahwa perilaku politik generasi muda tidak cukup dipahami melalui pendekatan komunikasi atau teknologi semata, tetapi memerlukan perspektif yang menghubungkan dimensi demokrasi dengan nilai-nilai moral sebagai dasar pengambilan keputusan.

Temuan penelitian juga memberikan implikasi bagi pengembangan pendidikan tinggi. Pembelajaran mengenai demokrasi perlu diarahkan pada kemampuan mahasiswa membaca realitas sosial secara kritis, mengevaluasi sumber informasi, serta membangun budaya dialog yang menghargai keberagaman pandangan. Pendekatan tersebut menjadi semakin penting mengingat arus informasi yang sangat cepat sering kali disertai dengan misinformasi, manipulasi opini, dan kecenderungan polarisasi. Dalam konteks ini, Nasoha et al. (2025) menjelaskan bahwa penerapan prinsip *tabayyun* merupakan fondasi penting dalam membangun komunikasi digital yang bertanggung jawab karena mendorong setiap individu melakukan klarifikasi sebelum mempercayai maupun menyebarkan suatu informasi.

Penguatan kemampuan tersebut perlu diiringi dengan pembentukan karakter. Kusumawati et al. (2025) menegaskan bahwa kecakapan digital tidak hanya berkaitan dengan penguasaan teknologi, tetapi juga kemampuan menilai validitas informasi dan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang rasional. Oleh sebab itu, pengembangan pendidikan politik seyogianya tidak berhenti pada transfer pengetahuan mengenai sistem pemerintahan, melainkan membentuk pribadi yang mampu mengelola informasi secara cermat, menghargai perbedaan, dan bertanggung jawab atas setiap aktivitas komunikasi yang dilakukan.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penyusunan kerangka analisis yang menghubungkan pemikiran filsafat politik dengan Pendidikan Islam dalam menjelaskan perilaku politik mahasiswa pada era digital. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung menempatkan media sosial sebagai objek kajian komunikasi atau partisipasi semata, penelitian ini memperlihatkan bahwa proses pembentukan kesadaran politik juga dipengaruhi oleh nilai-nilai etis yang membimbing seseorang ketika menilai informasi, menyampaikan pendapat, dan berinteraksi dengan orang lain. Pendekatan tersebut memperluas ruang diskusi mengenai pendidikan politik dengan memasukkan dimensi moral sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari praktik demokrasi kontemporer.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan terbesar pendidikan politik saat ini bukan hanya meningkatkan keterlibatan generasi muda dalam kehidupan publik, tetapi juga menyiapkan mereka agar mampu menghadapi kompleksitas ruang digital secara kritis, berintegritas, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Dengan landasan tersebut, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam membentuk warga negara yang tidak hanya memahami hak dan kewajibannya, tetapi juga mampu menjaga kualitas kehidupan demokrasi melalui perilaku komunikasi yang etis dan bertanggung jawab.

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan Instagram di kalangan mahasiswa FKIP Universitas Tanjungpura tidak lagi terbatas sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi, tetapi telah berkembang menjadi ruang politik digital yang membentuk cara mahasiswa memahami isu-isu publik, menyampaikan pendapat, membangun partisipasi, serta mengevaluasi informasi politik. Melalui wawancara terhadap informan, ditemukan bahwa pengalaman mahasiswa dalam menggunakan Instagram merefleksikan keterkaitan antara kebebasan berpendapat, partisipasi politik digital, pembentukan opini publik, legitimasi informasi, pengaruh algoritma, dan etika komunikasi. Seluruh aspek tersebut saling berhubungan dalam membentuk kesadaran politik mahasiswa di era digital.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya berperan sebagai pengguna media sosial, tetapi juga sebagai warga negara digital yang berupaya memverifikasi informasi, menghargai keberagaman pandangan, serta menyadari pentingnya tanggung jawab dalam setiap aktivitas komunikasi politik. Instagram tidak lagi dipahami sekadar sebagai media komunikasi, melainkan telah berkembang menjadi ruang politik digital yang memfasilitasi akses informasi, pembentukan opini publik, diskusi, dan partisipasi politik mahasiswa dalam kehidupan demokrasi.

Temuan ini memiliki relevansi terhadap Pendidikan Islam, terutama dalam penguatan nilai-nilai *tabayyun*, *ṣidq*, *amanah*, *syūrā*, dan *al-'adl* sebagai landasan etika komunikasi politik di ruang digital. Oleh karena itu, pendidikan politik di perguruan tinggi perlu mengintegrasikan literasi politik, literasi digital, dan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Islam guna membentuk generasi yang kritis, bertanggung jawab, dan berintegritas dalam menghadapi dinamika demokrasi digital. Penelitian ini memperkaya kajian mengenai ruang politik digital melalui perspektif filsafat politik sekaligus menunjukkan relevansinya terhadap pengembangan Pendidikan Islam di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Arendt, H. (1958). *The Human Condition*. University of Chicago Press.
- Castells, M. (2010). *The Rise of the Network Society* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Dahl, R. A. (1989). *Democracy and Its Critics*. Yale University Press.
- Ehrlich, T. (Ed.). (2000). *Civic Responsibility and Higher Education*. Oryx Press.
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiayati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., Jonata, Mashudi, I., Hasanah, N., Maharani, A., Ambarwati, K., Noflidaputri, R., Nuryami, & Waris, L. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Global Eksekutif Teknologi.
- Firman, Hasibuan, E. J., & Auza, A. (2025). Student perceptions of criticism ethics on Instagram: A case study of @Medantalk. *Social Sciences and Humanities Review*, 1(2), 60-68. <https://doi.org/10.64780/sshr.v1i2.57>
- Foucault, M. (1980). *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977*. Pantheon Books.
- Gupta, A., & Bhardwaj, S. (2024). Double-Tapping into Democracy: The Role of Instagram on Political Awareness of Students in Delhi Colleges. *Vivekananda Journal of Research*, 14(1), 77-89.
- Habermas, J. (1989). *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society* (T. Burger & F. Lawrence, Trans.). MIT Press. (Original work published 1962).
- Hudia, R., & Affandi, I. (2022). Students' perceptions of the use of Instagram social media as one of Generation Z's political education facilities. In *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* (Vol. 636, pp. 314-320). Atlantis Press.
- Ilhami, M. J., Ananda, D., Alya, R., & Hafizi, M. Z. (2025). Pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi politik bagi mahasiswa FKIP Universitas Tanjungpura. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(10), 2795-2800.
- Juliani, A., Sulistyarini, & Dewantara, J. A. (2025). Dampak penggunaan Instagram terhadap etika kewarganegaraan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 14(6), 1043-1050. <https://doi.org/10.26418/jppk.v14i6.92620>
- Keating, A., & Melis, G. (2017). Social media and youth political engagement: Preaching to the converted or providing a new voice for youth. *The British Journal of Politics and International Relations*, 19(4), 877-894. <https://doi.org/10.1177/1369148117718461>
- Lakapu, S. S., Stefanus, K. Y., & Udju, H. R. (2024). Kebebasan berpendapat dalam media sosial di Indonesia. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 2(4), 134-144. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i4.1559>
- Madung, O. G. (2013). *Filsafat Politik: Negara dalam Bentangan Diskursus Filosofis*. Penerbit Ledalero.
- Malkawi, O. S. S. (2025). The impact of Instagram on Turkish university students' attitudes toward political parties. *Studies in Media and Communication*, 13(1), 206-220. <https://doi.org/10.11114/smc.v13i1.7241>
- Mill, J. S. (2003). *On Liberty*. Yale University Press. (Original work published 1859).
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Oden, A., & Porter, L. (2023). The Kids Are Online: Teen Social Media Use, Civic Engagement, and Affective Polarization. *Social Media + Society*, 9(3). <https://doi.org/10.1177/20563051231186364>
- Pateman, C. (1970). *Participation and Democratic Theory*. Cambridge University Press.

- Pembayun, J. G. (2017). Rekonstruksi pemikiran Habermas di era digital. *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media*, 1(1), 1-14.
- Pembayun, J. G. (2017). *Diskursus Media, Demokrasi, dan Ruang Publik*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Pratama, M. I., Rahman, A., & Bachmid, F. (2022). Kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial dalam perspektif hak asasi manusia. *Qawanin: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1-16.
- Putri, F., Susiba, Andila, K., Anita, N., & Febriyanti, Q. (2025). Penguatan civic engagement Generasi Z melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *GARUDA: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Filsafat*, 3(2), 167-176. <https://doi.org/10.59581/garuda.v3i2.5119>
- Ribble, M. (2015). *Digital Citizenship in Schools* (3rd ed.). International Society for Technology in Education (ISTE).
- Saleh, S. (2023). *Mengenal Penelitian Kualitatif: Panduan bagi Peneliti Pemula*. AGMA Publisher.
- Setiawan, F. X. R. (2023). Peran media sosial sebagai ruang publik: Tinjauan filosofis gagasan ruang publik Jürgen Habermas. *Melintas*, 39(3), 323-350.
- Tayo, S. S., Adebola, S. T., & Yahya, D. O. (2019). Social media: Usage and influence on undergraduate studies in Nigerian universities. *International Journal of Education and Development Using Information and Communication Technology*, 15(3), 53–62.
- Tricana, D. W. (2011). Media massa dan ruang publik (*Public Sphere*): Sebuah ruang yang hilang. *Aristo*, 8, 8–13.
- Umayasari, U., & Amantha, G. K. (2025). Partisipasi warga melalui media digital dan implikasinya terhadap akuntabilitas serta perumusan kebijakan pemerintah daerah di Lampung. *Journal of Administration, Governance, and Political Issues*, 2(1), 109–124.
- Vinalti, G., Jannah, L., Ayyun, S. Q., & Kotyazhov, A. V. (2024). Digital navigation and fact-checking practices among first-time voters: A digital ethnographic study of social science students in Bengkulu, Indonesia. *Potret Pemikiran*.
- Wahid, D. S., Pratamawaty, B. B., & Purwanto. (2025). Pengaruh penggunaan media sosial untuk berita politik terhadap partisipasi politik daring pada mahasiswa Jawa Barat. *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 22(2), 140-160. <https://doi.org/10.36451/jisip.v22i2.87>
- Yuliani, W. (2018). Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam perspektif bimbingan dan konseling. *Quanta*, 2(2), 83–91. <https://doi.org/10.22460/q.v2i2p83-91.1641>
- Zainuddin, T. (2024). Pendidikan politik Islam melalui media sosial dalam meningkatkan partisipasi warga pada Pemilihan Presiden Tahun 2024. *Jurnal Politik Islam*, 4(1), 47-86.